

Ancaman Gerakan Etnonasionalisme Kurdi di Perbatasan Irak Utara terhadap Integrasi Nasional Turki

Renitha Dwi Hapsari

*Alumnus Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai gerakan etnonasionalisme Kurdi di Irak Utara dan hubungannya dengan integrasi nasional Turki. Alasan dasar penelitian ini adalah adanya tendensi dari gerakan etnis untuk menjadi ancaman signifikan bagi keamanan nasional dan integrasi nasional. Penelitian yang mendasari artikel ini dilakukan secara eksplanatif dengan menggunakan konsep deprivasi relatif dari Gurr, konsep difusi dan eskalasi konflik etnis dari Lobell dan Mauceri, serta konsep aliansi etnis dari Weiner. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab signifikannya ancaman tersebut adalah karena Kurdi menolak berpartisipasi dalam “Turkifikasi” sebagai proses integrasi nasional, keberadaan kekerasan fisik, dan keinginan mencapai otonomi politik.

Kata-Kata Kunci: *deprivasi relatif, gerakan etnonasionalisme Kurdi, aliansi etnis, ancaman, integrasi nasional Turki.*

This article analyzes the Kurds ethnonationalism movement in the Northern Iraq and its relationship with Turkey’s national integration. The reason behind this research is the tendency of ethnic movement to being a significant threat to national security and integration. The research is conducted explanatively using concept of relative deprivation by Gurr, Lobell and Mauceri’s concept of the diffusion and escalation of the ethnical conflict, along with the concept of the ethnic alliance by Weiner. In the end, we can conclude that the Kurd ethnonationalism movement in the Northern Iraq is being a significant threat of Turkey’s national integration because of the Kurds’ unwillingness to participate in the “Turkification” as the national integration process, physical violence and the demand to reach political autonomy.

Keywords: *relative deprivation, the Kurd ethnonationalism movement, ethnic alliance, threat, Turkey’s national integration.*

Etnonasionalisme merujuk pada nasionalisme tertentu, menyangkut populasi yang telah menjadi bagian dari otoritas bangsa namun menuntut otonomi atau kemerdekaan yang berdasarkan identitas etnis dan budaya (Bolaffi, et al. 2003). Etnonasionalis merupakan masyarakat yang terkonsentrasi secara regional, memiliki sejarah otonomi politik dan memiliki tujuan separatis (Gurr 1993, 18). Pada awalnya gerakan etnonasionalisme berusaha untuk mendudukkan orang seetnik dalam pemerintahan, lama-kelamaan akan berkembang menjadi gerakan separatisme untuk bisa melepaskan diri atau keluar dari tatanan negara-bangsa (www.prakarsa-rakyat.org).

Gerakan etnonasionalisme banyak terjadi di berbagai negara, terutama negara dengan tingkat heterogen etnis yang tinggi. Hal ini juga terjadi di Turki, menyangkut etnis Kurdi di wilayah perbatasan dengan Irak. Pada awalnya, bangsa Kurdi bertempat tinggal menetap di pegunungan Anatolia hingga Hormuz yang merupakan wilayah memanjang dari Turki sampai Iran. Pada awal tahun 1500-an, wilayah yang ditinggali oleh orang Kurdi menjadi ajang persaingan bagi Kekaisaran Turki Ottoman dan Persia-Iran (Kurdistan Regional Government 2007). Kekaisaran Turki Ottoman memenangkan peperangan dan berhasil menguasai tiga perempat luas wilayah yang sebelumnya ditinggali oleh orang Kurdi, sedangkan sisanya dikuasai oleh Persia.

Setelah keruntuhan Turki Ottoman pasca Perang Dunia I, wilayah Kurdi menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Burkay (2004) menyatakan bahwa dalam Perjanjian *Sykes-Picot* (1916), Kurdi dijanjikan diberi otonomi atas wilayah Irak Utara dan Turki Tenggara (Dawoody 2006). Selanjutnya sesuai isi Perjanjian Sevres (Harff, dalam Gurr 1993, 227) pada 10 Agustus 1920, Inggris juga menjanjikan pemerintah otonomi semi-negara pada orang Kurdi (Rahman 2003, 196). Sebelum perjanjian tersebut benar-benar diterapkan, Inggris mengubah isi perjanjian semula. Dalam Perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923, hasil dari perubahan Perjanjian Sevres, Inggris tidak menyebutkan soal negara maupun otonomi Kurdi (Rahman 2003, 196). Perjanjian ini mengenyampingkan keinginan Kurdi untuk bersatu dalam satu wilayah dan justru membagi Kurdi ke beberapa negara yang meliputi Turki, Irak, Iran, dan Syria (www.khrp.org). Sejak saat itu, Inggris menyerahkan Kurdi dibawah kekuasaan pemerintah Irak, Iran, Turki, dan Syria (Katzman 2010, 1). Sekitar 10 juta orang Kurdi tinggal di wilayah Turki, 5 juta orang di Irak, 6 juta orang di Iran, 1 juta orang di Suriah (Mashad 2003).

Meski diaspora telah menyebabkan perpisahan etnis Kurdi ke beberapa negara, namun etnis Kurdi dimana pun masih memiliki tingkat etnonasionalisme yang tinggi sebagai bangsa Kurdi. Orang-orang Kurdi yang tersebar di Timur Tengah dan Eropa, tinggal di wilayah perbatasan

antar negara dan termarginalkan. Jumlah etnis Kurdi juga minoritas di masing-masing negara yang tersebut di atas. Perlakuan pemerintah yang buruk dan kepentingan yang terabaikan memicu pemberontakan bangsa Kurdi untuk memperjuangkan otonomi khusus. Setidaknya, dengan memiliki wilayah otonom sendiri, orang-orang Kurdi dapat memiliki tempat untuk mengatur diri mereka sendiri, demi mempertahankan identitas dan sistem sosial-budaya mereka (Sihbudi 1993, 138). Otonomi yang diberikan oleh negara dapat menjadi jalan masuk bagi etnis minoritas Kurdi untuk melakukan pemisahan diri.

Kesadaran orang-orang Kurdi terhadap perjuangan nasib bangsa mereka sebenarnya telah timbul sejak abad ke-19, tepatnya pada tahun 1880 (Sihbudi 1993, 136). Sejak tahun 1920-an minoritas Kurdi di Iran, Irak, dan Turki membentuk gerakan politik untuk menekan pemerintah hingga mendapat kemerdekaan (Edwards 2000, 214). Pergerakan yang dilakukan tidak hanya dilakukan secara politik tetapi juga kekerasan fisik.

Pada tahun 1923, Kurdi di Irak melakukan pemberontakan untuk mendapatkan otonomi khusus. Puncaknya terjadi pada saat Perang Irak-Iran dan Invasi AS tahun 2003. Pada masa Perang Irak-Iran, etnis Kurdi justru berkoordinasi dengan pasukan Pasdaran Iran sehingga Irak mengalami kekalahan. Tidak hanya itu, PKK (Partiya Karkeren Kurdistan)-yang merupakan pemberontak Kurdi Turki, juga mengambil kesempatan untuk mendirikan basis pertahanan militer di wilayah Irak Utara (Sarkess dan Wayman 2010, 327). Ketika AS menginvasi Irak, orang-orang Kurdi justru melawan pasukan pemerintah dan membantu AS untuk dapat menangkap Saddam Hussein. Etnis Kurdi merupakan kelompok paling pro-AS di Irak (Katzman 2010, 2). Diberitakan bahwa sekelompok pemberontak yang menawan Saddam Hussein mencoba merundingkan hadiah 25 juta dollar AS yang dijanjikan pemerintah Washington. Dalam artikel "Mantan Presiden Irak Saddam Hussein Sudah Disandera Pengikutnya" (2003), perundingan tersebut diketahui telah dilakukan oleh tokoh terkenal Kurdi, Jalal Talabani. Sebelumnya, Pemerintah Saddam Hussein pernah melakukan pembantaian pada etnis Kurdi dengan menggunakan gas beracun pada tahun 1982 dan 1988. *Ethnic cleansing* yang dilakukan oleh pemerintahan Saddam Hussein terhadap bangsa Kurdi pada akhirnya membuat masyarakat internasional bersimpati. Pada tahun 1991, Kurdi di Irak Utara mendapat otonomi khusus dari pemerintah pusat setelah mendapat desakan internasional, baik dari negara tetangga maupun Dewan Keamanan PBB. Otonomi khusus menjadi jalan masuk bagi Kurdi untuk berjuang lebih keras demi mendirikan negara Kurdistan.

Di samping itu, Kurdi di Turki juga melakukan beberapa kali pemberontakan. Pemberontakan besar pertama yang dilakukan oleh

etnis Kurdi terhadap pemerintah Turki terjadi pada 1925, yang dikenal sebagai pemberontakan Syeikh Said (Olson 2009). Hal ini menandai titik balik perjuangan etnis Kurdi dalam sejarah pemerintahan Turki. Selanjutnya, pada tahun 1937-1938, etnis Kurdi kembali melakukan pemberontakan di wilayah Dersim-yang saat ini dikenal dengan Tunceli (Bruinessen 2010). Dalam pemberontakan tersebut, pasukan militer Turki melakukan genosida terhadap etnis Kurdi dengan menggunakan gas beracun. Perlawanan terus dilakukan oleh Kurdi terhadap pemerintah, salah satunya dengan mendirikan PKK pada tahun 1974 (Sarkess dan Wayman 2010, 327). PKK digunakan sebagai salah satu wadah untuk mengumpulkan aspirasi bangsa Kurdi, demi memperjuangkan kepentingan dan eksistensi etnis Kurdi di Turki.

Perubahan terjadi ketika pemerintahan Irak runtuh pada tahun 2003. Saddam Hussein berhasil ditangkap dan Jalal Talabani yang merupakan salah satu pemimpin Kurdi di Irak Utara diangkat sebagai Presiden Dewan Pemerintah Interim Irak. Selain itu, Jalal Talabani juga terpilih menjadi Presiden Irak selama dua periode (2005-2006). Kekuasaan Kurdi dalam pemerintahan Irak semakin kuat. Dengan demikian kesempatan bagi orang Kurdi untuk mendirikan negara Kurdistan semakin besar, terutama setelah dapat menjalankan otonominya secara legal. Peningkatan kekuatan Kurdi di perbatasan Irak Utara juga memicu adanya usaha pemberontakan di negara lain yang memiliki perbatasan langsung, seperti Turki. Prospek terbentuknya negara Kurdi di wilayah otonomi Irak dikatakan dapat memberikan stimulus bagi kebangkitan nasionalisme Kurdi di negara lain, khususnya Turki (Menon dan Wimbush 2007). Ikatan dan mobilitas etnis di kedua negara juga menjadi faktor pemicu difusi dan eskalasi konflik secara transnasional. Para pemberontak PKK Turki juga sering kali melarikan diri dan bersembunyi di wilayah perbatasan Irak Utara. Pemerintah Turki semakin takut dengan ancaman separatisme di negaranya. PKK terus meneror warga sipil dan tentara Turki dengan serangan bom dan senjata. Keinginan pemberontak Kurdi di perbatasan untuk memisahkan diri pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional di Turki.

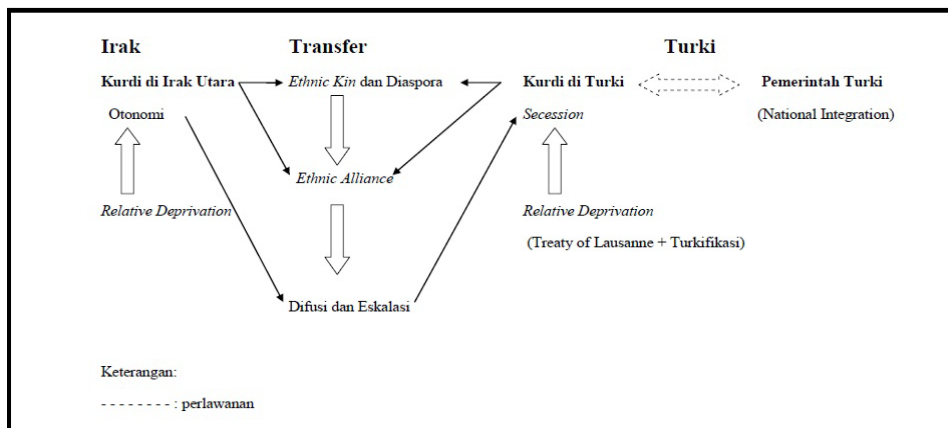
Tabel 1
Indikator Ancaman Etnis Kurdi
terhadap Integrasi Nasional Turki

Indikator	Tidak mengancam	Mengancam	Ancaman Serius
Turkifikasi	Disetujui	Beberapa ditolak	Ditolak penuh
Kekerasan	Demonstrasi	Pemboman	Baku tembak/ kontak senjata
Tuntutan	Hak-hak sosial, kultural, dan ekonomi	Hak-hak politik	Otonomi politik

Difusi dan Eskalasi Konflik

Gerakan etnonasionalisme terus dilakukan oleh suku Kurdi di perbatasan Irak Utara dan Turki Tenggara. Mereka menuntut hak untuk dapat hidup bebas, aman, dan makmur, melalui pembentukan negara Kurdistan (Hasan 2010). Sedikitnya 80% dari masyarakat Kurdi mendukung pemberontak untuk memisahkan diri dari pemerintah (Myrie 2007). Hal itu menjadi dukungan yang cukup besar bagi Kurdi untuk terus melakukan perlawanan terhadap otoritas pemerintah. Selama ini, Kurdi memiliki ikatan etnis yang kuat meski mereka telah mengalami diaspora ke berbagai negara. Mobilitas dan ikatan etnis menjadi faktor pendukung adanya *ethnic alliance* kelompok Kurdi, terutama di wilayah yang berbatasan secara langsung seperti Irak dan Turki. Adanya ikatan etnis dan *ethnic alliance* di kedua negara, serta intensitas mobilitas etnis memungkinkan terjadinya difusi dan eskalasi konflik.

Gambar 1
Difusi dan Eskalasi Konflik Etnis Kurdi



Berdasarkan cara-cara yang dijelaskan oleh Lake dan Rothchild (1998), difusi gerakan etnonasionalisme Kurdi Irak Utara ke Turki Tenggara terjadi karena (1) mobilisasi etnis Kurdi di Irak Utara menggerakkan etnis Kurdi di Turki untuk melakukan tuntutan ekstrim terhadap pemerintahnya, terutama setelah mobilisasi Kurdi di Irak Utara berhasil mencapai targetnya dalam mendapatkan otonomi dari pemerintah; (2) pertikaian Kurdi di Irak Utara menyebabkan kelompok Kurdi di Turki Tenggara berusaha mengubah efektivitas kontrak etnis dengan pemerintahnya, untuk mendapatkan otonomi yang sama; (3) berhasilnya taktik yang digunakan oleh Irak Utara, yang kemudian

memicu Kurdi di Turki Tenggara melakukan hal yang sama, dengan harapan akan mendapat keberhasilan yang sama pula. Seperti pernyataan pemberontak Kurdi berikut, “Kita memiliki hak untuk bebas seperti Kurdi Irak yang telah melawan rezim Saddam Hussein dan rezim-rezim sebelumnya” (Thorold 2007).

Perlawanan yang selama ini dilakukan oleh Kurdi Irak Utara secara tidak langsung menjadi aspirasi bagi etnis Kurdi Turki Tenggara, untuk melakukan strategi dan taktik yang sama dalam melawan pemerintah. Proses difusi ini berjalan secara tidak langsung atau *contagion*. Stephen M. Saideman (dalam Lake dan Rothchild 1998, 129) menyatakan bahwa “one kind of contagion may be inherent in secessionism: the departure of one ethnic group and its territory from a state may upset the political balance and cause other group to secede”. Dalam hal ini, otonomi yang diperoleh kelompok Kurdi Irak Utara dari otoritas pemerintahnya, mengganggu keseimbangan politik dan menyebabkan kelompok Kurdi di Turki Tenggara berusaha melakukan pemisahan diri. Proses penyebaran ini berjalan secara dua arah karena aliansi etnis yang terjalin di antara keduanya.

Gerakan etnonasionalisme Kurdi tidak hanya mengalami difusi tetapi juga eskalasi. Turki yang merasa terancam dengan aliansi etnis Kurdi di perbatasan secara tidak langsung ikut terlibat dalam konflik tersebut. Merujuk pada eskalasi konflik Lake dan Rothchild (1998), eskalasi konflik dalam kasus ini terjadi melalui dua cara. Pertama, karena pemberontak Kurdi di Turki Tenggara menggunakan wilayah Irak Utara sebagai basis militer sekaligus tempat perlindungan (Sarkess dan Wayman 2010, 327). Kedua, seperti yang nampa dalam artikel “AS Hambat Hasrat Kurdi Kuasai Kirkuk (2003), terdapat dimensi iredentis ketika Kurdi memiliki keinginan kuat untuk bersatu dan mendirikan negara Kurdistan. Upaya tersebut diharapkan dapat terwujud setelah pemerintah Turki memberikan otonomi pada etnis Kurdi di wilayahnya, sama seperti yang diperoleh Kurdi di Irak Utara sebelumnya. Merujuk pada pernyataan Lobell dan Mauceri (2004 dalam Hippler, ed., 2005), difusi dan eskalasi konflik ini juga didukung oleh melemahnya struktur lembaga negara di Irak pasca kejatuhan rezim Saddam Hussein, yang justru memperkuat Kurdi di perbatasan untuk melakukan pemisahan diri. Ketika rezim Saddam Hussein jatuh akibat invasi pada tahun 2003, otonomi Kurdi di Irak Utara justru semakin menguat (Dawoody 2006).

Pemberontakan terus dilakukan oleh Kurdi di Turki Tenggara sebagai cara untuk mendapatkan otonomi dari pemerintah. Otonomi menjadi pintu masuk bagi orang-orang Kurdi untuk melakukan pemisahan diri, sekaligus kesempatan untuk mendirikan negara Kurdistan. Apabila Horowitz mengatakan bahwa “secession is an attempt by an ethnic group claiming a homeland to withdraw with its territory from authority

of a larger state of which it is a part". Maka pemberontak Kurdi menuntut wilayah Kurdistan yang diklaim sebagai "*homeland*", meliputi wilayah Turki Tenggara, Irak Utara, Syria Timur Laut, serta Iran Barat Laut, dari otoritas negara yang bersangkutan (Sarkess dan Wayman 2010, 327). Dengan demikian, selama ini Kurdi di perbatasan berusaha untuk membentuk negara demi nasionalisme yang berbasis etnisitas dan *kinship*, seperti yang dinyatakan oleh Evans dan Newman (1992).

Pada dasarnya gerakan etnonasionalisme Kurdi berasal dari kondisi *relative deprivation* akibat ketidakpuasan terhadap Perjanjian Lausanne dan proses Turkifikasi yang diterapkan oleh pemerintah Turki. Merujuk pada 3 fase yang diutarakan oleh Ted Robert Gurr dalam karyanya yang berjudul *Why Men Rebel* (1970), *secessionism* yang dilakukan oleh Kurdi dapat digolongkan sebagai *political violence*, yang merupakan fase terakhir atau puncak dari *relative deprivation*. Fase pertama diawali oleh adanya ketidak-puasan akibat perubahan dalam Perjanjian Lausanne 1923, yang menyebabkan diaspora Kurdi ke dalam beberapa wilayah berdaulat, sekaligus menimbulkan frustrasi. Kemudian, fase kedua dipicu oleh kebijakan Turkifikasi 1925, yang mengingkari identitas Kurdi sekaligus pemaksaan proses integrasi Turki sehingga menimbulkan agresi.

Aliansi etnis Kurdi sering melakukan mobilisasi di wilayah perbatasan. Wilayah pegunungan di perbatasan dengan Irak Utara merupakan surga bagi para pemberontak. Wilayahnya curam dengan puncak bergirigi, tertutup oleh pepohonan dan gua-gua di sepanjang lereng bukit, sungai yang mengalir di pedesaan juga tersembunyi oleh hutan. Wilayah tersebut terkenal dengan area yang sulit ditempuh bagi tank-tank militer, sehingga strategis bagi tempat persembunyian para pemberontak. Salah satunya, Gunung Kandil yang terletak di wilayah perbatasan Irak Utara. Pemerintah Turki menyatakan bahwa 3.000 pemberontak Kurdi tinggal dan berbasis militer di sana, sekaligus melancarkan serangan ke Turki (Thorold 2007). Selain itu, masih ada wilayah Avasin Baysan (Irak) dan Pegunungan Iki Yaka dan Buzul Dagi di Turki.

Pemberontak di perbatasan juga dihubungkan oleh saluran komunikasi untuk mengkoordinasikan massa, sekaligus mencari dukungan masyarakat luas khususnya bangsa Kurdi di berbagai negara. Pada awalnya para pemberontak menggunakan radio bawah tanah dan berkembang menggunakan televisi serta jaringan internet. Dalam artikel "Kurdish Stations Keep Diaspora in Touch" dan Wardhani (2010, 47), radio bawah tanah yang digunakan meliputi *the Voice of Independent Kurdistan*, Radio Kurdistan, *Voice of Komala*, dan *Voice of the People of Kurdistan*. Downer (1993 dalam Wardhani 2010, 47)) menjelaskan penggunaan radio bawah tanah demi tujuan pemisahan diri sebagai

taktik *clandestine radio*. Pemberontak Kurdi juga berjuang melalui Kurdistan TV, Med TV, dan 10 televisi lokal lainnya di Irak Utara. Untuk mencari dukungan yang lebih luas, pemberontak memanfaatkan internet. Beberapa situs internet yang digunakan oleh pemberontak Kurdi meliputi www.ekurd.net, www.krg.org, www.kdp.pp.se/ktv, www.freedom-for-ocalan.com, www.kurdmedia.com, www.kurdsat.tv, www.kurd.org, www.pkconline.com, www.khrp.org, dan lain-lain. Dengan demikian mereka dapat berjuang dengan lebih efektif.

Kurdi di Turki Tenggara juga mengalami tindakan represif oleh pemerintah Turki. Hal itu dilakukan karena ketakutan Turki terhadap pemberontak Kurdi yang berusaha memisahkan diri dan bergabung dengan Irak Utara untuk mendirikan negara Kurdistan. Kurdi di Irak Utara justru cenderung melindungi kerabat sesama etnisnya, dari represi-represi yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Dalam artikel "Warga Irak Utara Menolak Permintaan Ekstradisi Pemimpin PKK" (2007), pada tahun 2007 Deputy Perdana Menteri Turki Cemil Cicek, meminta agar para pemimpin kelompok pemberontak Kurdi yang berbasis di Irak Utara untuk diekstradisi, namun upaya tersebut ditolak oleh warga Irak. Selain itu, Menteri Luar Negeri Irak, Hoshyar Zebari pernah memperingatkan Turki agar tidak melakukan operasi militer dalam melawan PKK karena dapat mengganggu stabilitas regional terkait dengan keberadaan Kurdi di Irak Utara (BBC 2008a). Hal itu dianggap tidak bisa diterima dan akan mengancam kedaulatan Irak (BBC 2008b). Sebelumnya, representasi Kurdi dalam dewan pemerintah Irak menolak kehadiran 20.000 pasukan militer Turki ke wilayah Irak Utara (BBC 2003). Secara tidak langsung, respon Irak terhadap pemerintah Turki menunjukkan bahwa mereka berusaha melindungi pemberontak Kurdi yang berada di wilayahnya.

Pada dasarnya, terdapat kecenderungan bagi suatu etnis untuk berpihak pada kerabat sesama etnis pada sebuah wilayah di luar lintas batas negara, terutama ketika *ethnic kin* mendapat represi dari pihak lain (Wardhani 2010, 18). Hal itulah yang selama ini dilakukan oleh Kurdi di Irak Utara terhadap pemberontak Kurdi Turki. Dukungan yang diberikan oleh Irak Utara terhadap Kurdi Turki dikenal dengan istilah *blood brothers*. Suhrke dan Noble (1981) menyatakan bahwa dukungan yang diberikan berdasarkan faktor genetik oleh *blood brothers* berdampak signifikan bagi etnis yang sedang menghadapi pertikaian, baik dengan negara maupun dengan kelompok etnis lainnya.

Selama ini, kelompok etnis yang terdiaspora dapat berperan ganda, sebagai pihak yang membantu proses resolusi konflik melalui intervensi konstruktif atau pihak yang membantu meningkatkan intensitas aspek kekerasan di negara induk (Wardhani 2010, 19). Dalam kasus ini, diaspora Kurdi justru meningkatkan aspek kekerasan. Terbukti dengan

banyaknya kekerasan fisik dan terorisme yang terus dilakukan oleh pemberontak Kurdi, sehingga konflik tidak bisa terselesaikan hingga saat ini. Pemberontak Kurdi tidak hanya melakukan kekerasan fisik dan terorisme secara langsung dari dalam negeri tetapi juga dari luar melalui basis militer di Irak Utara.

Kekerasan Fisik Etnis Kurdi Terhadap Pemerintah Turki

Etnis Kurdi yang berada di perbatasan Irak Utara sering kali melakukan serangan dan kekerasan fisik sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah Turki. Hal itu dilakukan sebagai wujud resistensi Kurdi terhadap kebijakan dan represi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Turki. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh etnis Kurdi memiliki tingkat tersendiri, mulai bentrokan dengan polisi, pemboman, hingga kontak senjata melawan pasukan pemerintah. Kekerasan fisik terpaksa dilakukan oleh etnis Kurdi karena upaya demokratis yang selama ini dilakukan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

Merujuk pada Fearon dan Laitin; Lake dan Rothchild; serta Posen yang menyatakan bahwa kekerasan dilakukan sebagai alternatif terakhir dan dianggap sebagai pilihan rasional yang berkaitan dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup di masa depan (Carlsnaes et al. 2002, 299). Maka pemberontak Kurdi melakukan kekerasan terhadap pemerintah untuk memperjuangkan identitas dan eksistensinya di Turki setelah pemerintah menerapkan represi untuk menghilangkan identitas etnis Kurdi. Tindakan represif pemerintah semakin parah dengan adanya diskriminasi terhadap etnis Kurdi, sehingga Kurdi mengalami *relative deprivation*. Seperti yang dikatakan oleh Ted Robert Gurr bahwa *relative deprivation* merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya kekerasan kolektif (Carlsnaes et al. 2002, 298). Dalam prakteknya kekerasan fisik yang dilakukan oleh etnis Kurdi tidak hanya melukai pasukan keamanan dan pejabat pemerintahan tetapi juga warga sipil.

Etnis Kurdi seringkali melakukan demonstrasi besar-besaran di beberapa wilayah, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terhadap pemerintah. Mereka menuntut pemerintah supaya memenuhi kepentingannya. Dalam prakteknya, demonstrasi tersebut juga diwarnai dengan aksi kekerasan fisik seperti pelemparan batu pada polisi Turki, sehingga menyebabkan bentrokan di antara keduanya (Primus 2009). Pada tahun 2005, sekitar 500 anggota PKK bentrok dengan polisi Turki (Liputan 6 2005). Dalam bentrokan tersebut, PKK melemparkan bom molotov dan batu pada polisi Turki. Pada tahun 2006, tercatat 12 orang meninggal dunia di wilayah tenggara dalam bentrokan antara pemberontak Kurdi dengan pasukan keamanan Turki (BBC 2011a). Pada

tahun 2009, bentrokan kembali terjadi antara polisi dan massa pendukung DTP, yang dikenal memiliki hubungan erat dengan PKK (Kompas 2009).

Pemberontak Kurdi juga seringkali melakukan pemboman dan melakukan terorisme lainnya terhadap pemerintah Turki. Hampir setiap tahun, pemberontak Kurdi melakukan pemboman di berbagai wilayah. Pada tahun 2002, 2003, dan 2004, PKK terlibat dalam pemboman kecil di sejumlah tempat pengadilan dan restoran cepat saji yang mengakibatkan beberapa korban di area sekitarnya (Pike 2008). Pada tahun 2003 tercatat 25 orang korban meninggal dunia dan 200 orang lainnya luka-luka dalam peledakan bom di wilayah Istanbul, serta 28 orang korban meninggal dunia dalam pemboman di Bank dan Konsulat Inggris (BBC 2011b). Pada tahun 2008, 17 orang terbunuh dan sekitar 150 lainnya menderita luka-luka ketika dua bom meledak di daerah perumahan Istanbul (BBC 2008c). Selain itu, pemberontak Kurdi juga memasang bom di beberapa wilayah dekat perbatasan yang ditujukan pada pejabat pemerintah dan kendaraan pasukan militer Turki. Pada tahun 2009, sembilan prajurit Turki meninggal dunia dalam ledakan bom di pinggir jalan Turki Tenggara dan diduga dilakukan oleh PKK (Gee 2009).

Pemberontak juga terus melakukan kontak senjata dan serangan langsung terhadap pasukan militer pemerintah yang berjaga di wilayah perbatasan. Berdasarkan data militer Turki diketahui bahwa 12 warga sipil, 19 anggota pasukan keamanan, serta 71 pemberontak tewas dalam kontak senjata selama tahun 2003 (Pike 2008). Pada Mei 2004, PKK memutuskan untuk mengakhiri gencatan senjata terhadap pasukan pemerintah karena tidak ada perkembangan yang signifikan atau anihilisasi (BBC 2011b). Dalam artikel "Dua Pemberontak Kurdi Tewas di Turki Timur" (2006), yang menjelaskan mengenai serangan pemberontak Kurdi terhadap militer Turki sehingga dua perwira militer Turki terbunuh, dikatakan juga bahwa terjadi peningkatan aksi kekerasan oleh PKK selama dua tahun terakhir. Parlemen Turki akhirnya memutuskan untuk mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan pada bulan Mei tahun 2007. Akhir tahun 2007, Turki kembali melakukan serangan udara terhadap PKK di wilayah Irak. Sebagai balasannya, pada tahun 2008, PKK kembali melakukan serangan dari Irak Utara dan menewaskan 15 tentara Turki (BBC 2008d). Jejak kekerasan PKK terdapat di sejumlah provinsi di Turki Tenggara menjadi bukti perjuangan keras Kurdi dalam melawan pemerintah (Pike 2008). Baku tembak atau kontak senjata yang selama ini dilakukan dalam melawan militer digunakan sebagai simbol perang terhadap otoritas pemerintah yang sedang berkuasa.

Integrasi Nasional Turki

Proses integrasi nasional suatu negara tidak terlepas dari upaya *nation-building* yang dilakukan. Setiap negara melalui proses ini untuk membentuk negara yang modern. Proses *nation-building* dalam integrasi nasional, menuntut masyarakat untuk loyal terhadap negara. Seperti yang dikatakan Barbalet yang dikutip oleh Lockwood (2006, 534) bahwa “social integration also derived from a direct sense of community membership based on loyalty to a civilisation which is a common possession”. Merujuk pada pernyataan Myron Weiner pada tulisannya tahun 1966, ada dua pola kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai integrasi nasional (Surbakti 1992, 52-53). Di Turki, pemerintah menerapkan kebijakan dengan menghapuskan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dan mengembangkan “kebudayaan nasional” dari kebudayaan suku bangsa dominan, lebih dikenal dengan istilah asimilasi. Kemal Atatürk percaya bahwa homogenitas kultural merupakan satu-satunya metode untuk menjaga keutuhan bangsa Turki (Akyol 2008). Pemerintah Turki menerapkan asimilasi melalui kebijakan Turkifikasi, yang mengarah pada *civic nationalism*.

Turkifikasi diadopsi sejak 1935, dicetuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Namun, kebijakan ini baru dituangkan dalam konstitusi Turki pada tahun 1937 (Zürcher 2003, 236). Mustafa Kemal Atatürk melakukan reformasi radikal di bidang politik, ekonomi, dan sosial untuk mengubah Turki menjadi negara modern, yang pada dasarnya mengarah pada upaya westernisasi (Sansal t.t.). Ada enam prinsip atau “*six arrows*” yang menjadi dasar Turkifikasi menurut Zürcher (2003, 235-236). Pertama adalah sekularisme, tidak hanya diinterpretasikan sebagai pemisahan agama dan negara, tetapi juga sebagai penyingkiran agama dari kehidupan publik. Sekularisme ini menentang Islam yang dianggap dapat menghambat proses westernisasi. Yang kedua adalah nasionalisme, dimanfaatkan sebagai alat utama dalam pembinaan identitas nasional baru. Ketiga, republikanisme, dalam bentuk pelarangan aktivitas politik yang mendukung kembalinya monarki. Hal ini direalisasikan dengan mengubah Kekaisaran Ottoman menjadi Republik Turki, dan merealisasi identitas nasional Turki yang lebih modern. Bentuk baru Turki Republik juga disahkan dalam Konstitusi Pasal 1. Yang keempat adalah populisme, berarti gagasan tentang solidaritas nasional dan mengutamakan kepentingan-kepentingan seluruh bangsa di atas kepentingan kelompok atau kelas, serta pelarangan terhadap segala aktivitas politik yang berlandaskan kelas. Kelima, revolusionisme atau reformisme, dalam artian menghilangkan konsep-konsep tradisional dan mengadopsi konsep-konsep yang lebih modern. Reformisme juga melegalkan cara radikal untuk mengubah kehidupan sosial dan politik Turki. Yang terakhir adalah statisme,

negara meregulasi segala aktivitas ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap pengaruh asing dalam perekonomian negara.

Penolakan Penuh Etnis Kurdi atas Kebijakan Turkifikasi Pemerintah

Pada dasarnya, etnis Kurdi menolak secara penuh kebijakan Turkifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya melakukan asimilasi untuk membentuk satu identitas nasional di Turki. Asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Turki cenderung dipaksakan. Banyak etnis minoritas yang menolak upaya tersebut, khususnya Kurdi. Semua prinsip dalam kebijakan Turkifikasi sangat bertolak-belakang dengan kepentingan dan keinginan etnis minoritas Kurdi.

Sekularisme atau reformasi agama yang menghapuskan identitas dan karakteristik agama yang melekat dengan rezim Kekaisaran Ottoman, dalam prakteknya telah menghapuskan simbol-simbol kekhalifahan yang sebelumnya mempersatukan etnis Kurdi dan Turki. Sebelumnya, Kekaisaran Ottoman dipimpin oleh Sultan Muhammad II yang merupakan pemeluk Islam Sunni seperti yang dianut oleh sebagian besar etnis Kurdi di Turki. Sultan merupakan khalifah, pemimpin negara sekaligus agama. Etnis Kurdi sangat hormat terhadap pemimpin agamanya. Apalagi kekaisaran dibentuk dengan menghormati masyarakat multietnis dan multireligi (Solihat 2008). Perubahan dari Kekaisaran menjadi Republik Turki secara garis besar mengubah kehidupan etnis Kurdi. Islam yang telah berfungsi sebagai agama dan sistem hidup bermasyarakat dan bernegara berusaha dihilangkan dan digantikan oleh sistem Barat. Banyak larangan bagi pemeluk Islam untuk melakukan hal-hal sesuai syariah. Mereka tidak bisa beribadah secara bebas karena restriksi yang ditetapkan oleh pemerintah Turki. Pada awal tahun 1921, pemerintah Kemalis telah menghadapi konfrontasi dari suku Kurdi Koçgiri di wilayah Sivas. Empat tahun selanjutnya, pemberontakan kembali terjadi dipimpin oleh Syeikh Said. Pemberontakan ini dilakukan oleh etnis Kurdi dengan motif etnik dan religius, untuk mengembalikan sistem kekhalifahan serta menuntut otonomi bagi etnis Kurdi.

Republikanisme merupakan bentuk penolakan terhadap struktur politik Kekaisaran Ottoman. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengesahkan Republik Turki pada tahun 1923 dan mengangkat Mustafa Kemal Atatürk sebagai Presiden Turki yang pertama. Dalam hal ini, Republik Turki yang dibentuk juga mencakup wilayah Kurdistan, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lausanne. Selain itu, dalam perjanjian tersebut

Turki diberi kedaulatan penuh atas semua wilayahnya dan kesepakatan dalam perjanjian sebelumnya dihapuskan (Sansal t.t.). Ide mengenai republikanisme ini secara tidak langsung menghapuskan upaya etnis Kurdi untuk memiliki negara sendiri atas wilayah Kurdistan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial sebelumnya dalam Perjanjian Sykes-Picot dan Sevres. Oleh karena itu, etnis Kurdi terus melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Turki menuntut otonomi politik. Otonomi tersebut menjadi jalan masuk bagi etnis Kurdi untuk melakukan pemisahan diri dari Turki.

Nasionalisme menekankan pada persatuan atas identitas nasional Turki, sesuai dengan *civic nationalism*. Sejak awal nasionalisme ini bertolak belakang dengan *ethnic nationalism* yang dijunjung tinggi oleh Kurdi di berbagai wilayah. Dalam prakteknya, pemerintah menerapkan kebijakan asimilasi yang dibentuk berdasarkan etnis mayoritas Turki, yang dalam proses pembentukannya mengorbankan budaya dan identitas etnis-etnis minoritas lainnya, khususnya Kurdi. Hal itu secara tidak langsung menunjukkan penolakan terhadap identitas Kurdi yang sebenarnya. Pemerintah juga menerapkan reformasi bahasa. Pada tahun 2003, tercatat bahwa beberapa orang asli Kurdi dilarang untuk mendaftarkan anaknya dengan menggunakan nama Kurdi (Pike 2008). Peraturan tersebut telah diamandemen oleh parlemen dalam Census Law. Penggunaan bahasa Kurdi dalam kehidupan sehari-hari juga dilarang. Kebijakan pemerintah yang terlalu represif justru meningkatkan etnonasionalisme Kurdi untuk memperjuangkan identitas dan eksistensinya di wilayah Turki. Hal itu diwujudkan dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah hingga saat ini. Etnis Kurdi tidak berhenti melakukan pemberontakan sebelum tuntutan mereka untuk mendapatkan otonomi politik dipenuhi.

Populisme dibentuk dengan menghapus kepentingan individual dan kelas mengarah pada sistem egalitarian yang menjunjung persamaan derajat. Namun dalam penerapannya, pemerintah justru tidak memberikan jaminan bagi hak-hak asasi bagi etnis Kurdi di Turki. Mulai dari hak-hak kultural dan sosial, hak ekonomi, hingga hak-hak politik. Tidak ada persamaan derajat bagi Kurdi, mereka justru mengalami represi dari pemerintah. Setelah identitas mereka berusaha digantikan dengan identitas Turki, banyak etnis Kurdi yang hanya dijadikan buruh, dan para wanitanya hanya dijadikan selir. Anak-anak dilarang bersekolah dan menggunakan bahasa Kurdi. Perlawanan dalam pemberontakan Dersim pada tahun 1937-1938 justru membuat hak-hak bagi Kurdi semakin ditindas. Bahkan, banyak etnis Kurdi yang diusir dari tanah miliknya sendiri dan rumahnya di bakar oleh pemerintah. Hal itu semakin diperparah oleh tindakan pemerintah membentuk The Village Guard System yang membuat etnis Kurdi yang telah terusir ke pengasingan tidak bisa kembali ke tempat asalnya.

Dengan statisme negara mengambil alih perekonomian dan menerapkan kebijakan proteksionisme. Industri-industri besar diambil-alih dan dikelola oleh negara untuk menghindari penyebaran pengaruh asing dalam perekonomian. Turki juga menerapkan sistem ekonomi terpusat. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di kota-kota besar yang dekat dengan pemerintahan. Wilayah-wilayah pinggiran yang dihuni oleh mayoritas Kurdi di Turki Tenggara dan Timur kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dikatakan bahwa terjadi kesenjangan perekonomian (*gap*) yang cukup tinggi antara wilayah Turki di pusat dengan wilayah Kurdi di Turki Tenggara. Distribusi yang kurang merata ini juga memicu *relative deprivation* etnis Kurdi di Turki untuk melakukan aksi politik terhadap otoritas pemerintah.

Reformisme atau revolusionisme merupakan alat bagi rezim Kemalis untuk mengimplementasikan aturan-aturan baru. Masyarakat harus mengikuti perubahan-perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait program-program di berbagai bidang. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengikuti peradaban Barat untuk mempermudah hubungan dengan negara-negara Eropa. Proses reformasi ini dilakukan secara radikal. Dalam penerapannya, pemerintah juga melakukan represi-represi terhadap pihak yang menolak kebijakan pemerintah. Etnis Kurdi menjadi salah satu korban dari reformasi radikal ini. Semua budaya dan peradaban asli Kurdi berusaha dihapuskan, seperti literatur, pakaian tradisional, hari besar, lagu-lagu daerah, dan lain-lain. Etnis Kurdi yang masih menggunakan simbol-simbol budaya asli dihukum karena dianggap melanggar konstitusi. Resistensi etnis Kurdi dalam melawan pemerintah yang dilakukan hingga saat ini, berhasil membuat Kurdi menjadi satu-satunya etnis resisten terhadap kebijakan Turkifikasi.

Tuntutan Etnis Kurdi terhadap Pemerintah Turki

Tuntutan etnis Kurdi pada pemerintah Turki tercantum dalam "*proposals for a solution*" yang dibuat oleh pemimpin PKK, Abdullah Ocalan. Abdullah Ocalan merupakan representatif politik bagi etnis Kurdi di Turki. Proposal tersebut dijadikan sebagai dasar penyelesaian masalah Kurdi secara demokratis. Menurut Ocalan (2007) ada sembilan poin tuntutan yang tercantum dalam proposal tersebut. Yang utama adalah masalah Kurdi harus ditangani sebagai dasar proses demokratisasi. Identitas Kurdi harus mendapat jaminan di bawah hukum dan konstitusi. Secara lebih lanjut, dalam amandemen konstitusi yang baru harus menuliskan kalimat "The Constitution of the Republic of Turkey accepts that all cultures express their existence and themselves democratically".

Selain persoalan demokratisasi, tuntutan lainnya adalah hak-hak kultural dan bahasa dijamin oleh hukum. Tidak ada batasan atau halangan bagi etnis Kurdi untuk menggunakan siaran radio, TV, dan media lainnya. Prosedur untuk dapat masuk dalam siaran radio dan TV Turki, memperbolehkan siaran dengan bahasa Kurdi dan bahasa-bahasa lainnya. Aktivitas kultural harus memiliki prosedur dan regulasi yang sama. Yang berikutnya adalah bahasa Kurdi harus digunakan dalam pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Setiap orang tua diberi hak untuk memilih apakah akan memberikan pendidikan Kurdi pada anak-anaknya. Di sekolah menengah, budaya Kurdi, bahasa Kurdi, dan literatur harus menjadi bagian dari mata pelajaran pilihan dan masuk dalam kurikulum pendidikan. Di tingkat universitas harus disediakan fakultas yang berfokus dengan pembelajaran bahasa, sejarah dan literatur tentang Kurdi.

Poin selanjutnya dalam tuntutan etnis Kurdi adalah persoalan halangan dan hambatan dalam kebebasan berekspresi dan membentuk asosiasi harus dihilangkan serta pemerintah harus menyediakan segala kondisi untuk menjamin kebebasan dalam aktivitas politik. Semua kebebasan harus dihormati untuk menyelesaikan masalah dengan Kurdi. Terkait dengan itu, regulasi partai politik dan pemilihan umum harus demokratis dan semua orang Kurdi dengan kekuatan demokratiknya harus diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi dalam sistem politik yang juga demokratik.

Tuntutan selanjutnya adalah mengenai hukum administrasi demokrasi lokal yang harus dibentuk sehingga demokrasi memiliki dasar yang kuat dan mencakup segala hal. Untuk itu, tuntutan lainnya terkait dengan keberadaan *The Village Guard System* dan kelompok yang tidak terlegitimasi dalam negara harus dihapuskan. Dampaknya kemudian, semua pengungsi yang terpaksa keluar atau diasingkan dari desanya selama perang harus diperbolehkan kembali ke tempat atau desa asalnya. Dalam hal ini, perubahan tindakan administratif, yudisial, ekonomi dan sosial penting untuk dilakukan. Di samping itu, kampanye perkembangan ekonomi harus dimulai kembali dan kesejahteraan ekonomi harus ditingkatkan, termasuk insentif dan lainnya. Terakhir, perdamaian sosial dan partisipasi demokratik bagi para pemberontak, orang yang dipenjara, dan semua pengungsi yang terpaksa keluar karena pengasingan harus mendapat jaminan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik yang demokratis tanpa ada batasan atau hambatan yang menghalangi.

Permasalahan Kurdi merupakan masalah yang sangat kompleks dan penting karena menyangkut berbagai aspek. Masalah ini harus segera diselesaikan supaya tidak menyebabkan masalah lainnya yang mungkin timbul (*contagion effect*) sehingga menyebabkan permasalahan menjadi

semakin sulit untuk diatasi. Dalam proposal tersebut, Ocalan menghimbau kepada pemerintah Turki untuk menghormati nasionalisme etnis Kurdi seperti nasionalisme Turki sendiri. Solusi dari permasalahan ini adalah membentuk hubungan yang strategis antara Kurdi dan Turki, dengan meletakkan kedudukan yang setara bagi keduanya (Ocalan 2007). Dalam proposal tersebut, Ocalan juga menyatakan bahwa tindakan represi dan restriksi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Turki merupakan suatu bentuk kekerasan atau bahkan terorisme terhadap etnis Kurdi. Permasalahan Kurdi tidak seharusnya diselesaikan dengan upaya kekerasan dan militer, ada metode yang lebih demokratis untuk dapat menyelesaikannya. Dalam bahasa Ocalan (2007):

I have no intention of establishing a state. All I care for is democracy. The Kurdish people also need democracy. Hence I propose Democratic Self-Rule for Kurdistan for the Kurds. To me the essence of the whole thing is the freedom of Kurds within the present borders and states.

Dari proposal tersebut dapat dilihat bahwa tuntutan Kurdi tidak hanya menyangkut isu sosial, kultural dan ekonomi tetapi juga politik. Keinginan etnis Kurdi untuk mendapatkan otonomi politik atas wilayah Kurdistan sangat kuat. Namun dalam kenyataannya, pemerintah Turki masih ragu untuk menyelesaikan masalah ini. Inisiatif demokratis dalam A Democratic Opening Plan untuk menyelesaikan masalah Kurdi yang dicetuskan oleh Recep Tayyip Erdogan mendapat penolakan dari berbagai oposisi dalam pemerintahan. Kelompok oposisi menolak inisiatif tersebut dan secara tegas menolak tindakan pemerintah untuk menyerahkan otonomi politik pada pemberontak, yang disebut sebagai teroris (Head 2010). Upaya damai dalam permasalahan ini dapat dicapai ketika pemerintah Turki benar-benar mau melakukan *mutual negotiation* dengan etnis Kurdi. Gencatan senjata yang selama dilakukan oleh Kurdi dalam beberapa tahun juga tidak mendapat tanggapan dari otoritas pemerintah Turki atau anihilisasi.

Kurdi merupakan etnis minoritas yang memiliki pengaruh besar terhadap politik nasional Turki (Pike 2008). Populasi etnis Kurdi yang cukup besar menjadi ancaman tersendiri bagi keutuhan nasional di Turki. Pada akhirnya, pemerintah Turki sulit untuk memenuhi tuntutan etnis Kurdi untuk mendapatkan otonomi politik. Otonomi politik merupakan isu yang selama ini dihindari oleh pemerintah di berbagai negara karena dapat menyebabkan disintegrasi. Otonomi politik baik secara teori maupun praktek telah menjadi jalan masuk bagi etnis minoritas untuk melakukan pemisahan diri dari negara berdaulat.

Dengan adanya penolakan penuh etnis Kurdi terhadap kebijakan Turkifikasi, kontak senjata sebagai bentuk kekerasan fisik pemberontak

terhadap otoritas pemerintah, serta tuntutan untuk mendapatkan otonomi politik, membuat permasalahan menyangkut etnis Kurdi menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional di Turki. Integrasi nasional yang selama ini berusaha dibangun dengan keras oleh pemerintah Turki menjadi terhambat karena gerakan etnonasionalisme Kurdi di perbatasan Irak Utara. Ancaman gerakan etnonasionalisme Kurdi terhadap integrasi nasional di Turki dapat dilihat dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap Irak, khususnya menyangkut pemberontak di wilayah Irak Utara; peningkatan jumlah pasukan militer di perbatasan; serta pidato-pidato yang disampaikan presiden Turki terkait masalah PKK.

Daftar Pustaka

Buku

- Bolaffi, Guido, et al., 2003. *Dictionary of Race, Ethnicity and Culture*. London: SAGE Publication Ltd.
- Carlsnaes, Walter, et al., 2002. *Handbook of International Relations*. London: SAGE Publication Ltd.
- Gurr, Ted Robert, 1993a. *Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Hippler, Jochen (ed.), 2005. *Nation-building, Key Concept for Peacefull Conflict Transformation?*. London: Pluto Press.
- Katzman, Kenneth, 2010. *The Kurds in Post-Saddam Iraq*. Washington D.C.: Congressional Research Service Report for Congress.
- Lake, David A., dan Donald Rothchild, 1998. *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation*. New Jersey: Princeton University Press.
- Milton-Edwards, Beverly, 2000. *Contemporary Politics in the Middle East*. Cambridge: Polity Press.
- Rahman, Musthafa Abdul, 2003. *Geliat Irak Menuju Era Pasca-Saddam Hussein*. Jakarta: Kompas.
- Sarkess, Meredith Reid, dan Frank Whelon Wayman, 2010. *Resort to War: A Data Guide to Inter-State, Extra-State, Intra-State, and Non-State Wars, 1816-2007*. Washington D.C: CQ Press.
- Sihbudi, Riza, 1993. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- van Bruinessen, Martin, 1994. "Genocide in Kurdistan? The Suppression of the Dersim Rebellion in Turkey (1937-38) and the Chemical War Against the Iraqi Kurds (1988)", dalam Andreopoulos, G.J. (ed.),

1994. *Conceptual and Historical Dimensions of Genocide*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Wardhani, Baiq L.S.W., 2010. *Globalisasi & Konflik Etnis*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Zürcher, Erik Jan, 2003. *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Dawoody, Alexander, 2006. "The Kurdish Quest for Autonomy and Iraq's Statehood". *Journal of Asian and African Studies*, **41**(5-6): 483-505.
- Gurr, Ted Robert, 1993b. "Why Minorities Rebel: A Global Analysis of Communal Mobilization and Conflict Since 1945", *International Political Science Review*, **14**(2): 161-201.
- Lockwood, David, 1996. "Civic Integration and Class Formation", *British Journal of Sociology*, **47**(3): 531-550.
- Menon, Rajan dan S. Enders Wimbush, 2007. "The US and Turkey: End of An Alliance?", *Survival*, **49**(2): 129-144.

Artikel Online

- Uni Sosial Demokrat Database, 2003. "Mantan Presiden Irak Saddam Hussein Sudah Disandera Pengikutnya?" [online]. dalam http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=3404&coid=1&coid=34&p=6 [diakses 1 April 2010].
- Kapanlagi.com, 2006. "Dua Pemberontak Kurdi Tewas di Turki Timur" [online]. dalam <http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/dua-pemberontak-kurdi-tewas-di-turki-timur-9rzfnf4.htm> [diakses 14 Juni 2011]
- Global Security, 2008. "Kurdistan-Turkey Integration" [online]. dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-turkey-integration.htm> [diakses 15 Juni 2011].
- Sansal, Burak, t.t. "Treaty of Lausanne", [online]. dalam <http://www.allaboutturkey.com/antlasma.htm> [diakses 4 Mei 2011].
- Akyol, Mustafa, 2008. "The Turkification of Turkey" [online]. dalam <http://www.hurriyet.com.tr/english/opinion/10397767.asp?yazarid=301&gid=260> [diakses 3 Mei 2011].
- BBC, 1999. "Kurdish Stations Keep Diaspora in Touch" [online]. dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/280649.stm> [diakses 29 September 2010]
- BBC, 2003. "Iraqis Split on Turkish Troops Plan" [online]. dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3173600.stm> [diakses pada 26 Mei 2011].

- BBC, 2008. "Iraq Warns Turkey over Incursion" [online]. dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7260478.stm> [diakses 24 Mei 2011].
- BBC, 2008. "Bentrok Turki dan Kurdi" http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/10/081004_turkeyclash.shtm [diakses 14 Juni 2011].
- BBC, 2008. "Turkish Troops Pull Out of Iraq" [online]. dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7270566.stm> [diakses 24 Mei 2011].
- BBC, 2011. "Turkey Timeline" [online]. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1023189.stm [diakses 26 Mei 2011].
- Gatra, 2003. "AS Hambat Hasrat Kurdi Kuasai Kirkuk" [online]. dalam <http://www.gatra.com/2003-04-08/artikel.php?id=27044> [diakses 31 Mei 2011].
- Gee, Hermione, 2009. "Pengungsi di Irak Utara Merasa Terlupakan" [online]. <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/pengungsi-di-irak-utara-merasa-terlupakan> [diakses 15 Juni 2011].
- Hasan, Karim, 2010. "A Case Commentary: Preparing the Kurdish Case in Turkey" [online]. dalam www.kurdishaspect.com/doc022310KH.html [diakses 24 Mei 2011].
- Head, Jonathan, 2010. "Turkey's Kurdish War Reignites" [online]. dalam <http://www.bbc.co.uk/news/10492696> [diakses 14 juni 2011].
- Jinan, Mutoharun, 2007. "Etnoreligius dan Nasionalisme" [online]. dalam <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid=20119> [diakses 22 April 2010].
- Kompas, 2009. "Polisi Kembali Bentrok dengan Massa DTP" [online]. dalam <http://www1.kompas.com/printnews/xml/2009/12/14/05592171/polisi.kembali.bentrok.dengan.massa.dtp> [diakses 20 Mei 2011].
- Kurdish Human Rights Project, 2007. "Kurds" [online]. dalam <http://www.khrp.org/kurds/history.htm> [diakses 18 April 2011].
- Kurdistan Regional Government, 2007. "Timeline of the Kurdistan Region's History" [online]. dalam <http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=03010600&rnr=143&anr=18686> [diakses 18 April 2011].
- Liputan 6, 2005. "Suku Kurdi dan Polisi Turki Bentrok" [online]. dalam http://berita.liputan6.com/read/108121/suku_kurdi_dan_polisi_turki_bentrok [diakses 20 Mei 2011].
- Mashad, Dhurorudin, 2003. "Jatidiri Bangsa Petualang "Kurdi"" [online]. dalam http://www.swaramuslim.net/islam/more.php?id=772_0_4_0_M [diakses 12 Maret 2010].
- Metro TV News, 2007. "Warga Irak Utara Menolak Permintaan Ekstradisi Pemimpin PKK" [online]. dalam <http://www.metrotvnews.com/mobile/mtrnews/48011> [diakses 1 November 2010].
- Myrie, Clive, 2007. "Kurds Show Coded Support for PKK" [online]. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7062971.stm [diakses 24 Mei 2011].

- Ocalan, Abdullah, 2007. "Proposals for a Solution, to the Kurdish Question in Turkey" [online]. dalam <http://www.freedom-for-ocalan.com/english/download/proposals-for-a-solution.pdf> [diakses 4 Juni 2011].
- Olson, Robert W., 2009. "The Emergence of Kurdish Nationalism and the Syeikh Said Rebellion" [online]. dalam <http://www.kurdistanica.com/?q=node/150> [diakses 28 Mei 2011].
- Pike, John, 2008. "Kurdistan-Turkey Insurrection" [online]. dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-turkey-insurrection.htm> [diakses 15 Juni 2011].
- Primus, Josephus, 2009. "Demo Tak Sah, Aktivis PKK Bentrok dengan Polisi" [online]. dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/02/16/09190252/Demo.Tak.Sah.Aktivis.PKK.Bentrok.dengan.Polisi> [diakses 18 Mei 2011].
- Sansal, Burak, t.t. "Ataturk's Reform" [online]. dalam <http://www.allaboutturkey.com/reform.htm> [diakses 4 Mei 2011].
- Solihat, Ade, 2008. "Kemalisme, Budaya dan Negara Turki" [online]. dalam http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID [diakses 4 Mei 2011].
- Thorold, Crispin, 2007. "Sympathy for Rebels in Northern Iraq" [online]. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7063402.stm [diakses 24 Mei 2011].